

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z. 2002. Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Abidin, Hasanuddin Z. 2001, Geodesi Satelit, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Abidin, H.Z. (2007) Penentuam Posisi Dengom GPS dan aplikasinya. PT Pradnga Paramita, Jakarta.
- Abidin,H.Zet al. 2011. Survei Dengan GPS. Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Badan pendapatan Daerah. 2019
- Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan pemerintah Pemerintah Kabupaten Berau. 2016 Bakhtiar, O., & Damara, D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1–109.
- Bos, E.S. 1977. Thematic Cartography, International Institute Of Aerial Survey And Earth Science-ITC, Yogyakarta : Faculty Of Geography Gadjah Mada university
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional jilid 1, Jakarta : Djambatan, Cet 12, 2008.
- Boedi Harsono. 2018. Hukum Agraria Indonesia. Cetakan Keempat. Universitas Trisakti, Jakarta
- Effendie, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni.
- Fitrianto, A. (2017). Pembuatan Panduan Pengukuran Gps Geodetik Dengan Metode Real-Time Kinematic (Rtk) Pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang. *Unnes*, 30–34.
- Harsono, Budi. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Budi. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Edisi Revisi Cetakan 8. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Budi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Budi. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Hukumhukum Tanah. Jakarta: Djambatan.
- Hastuti, P. R. H. 2015. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beerapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta). *Jurnal Reportorium* 2 (2): 199.
- Irawan, Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Penerbit Arkola.
- Ismail, I. 2011. Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 8 (53): 24-30.

- Juhadi dan Dewi L Noor .2001. Peta Tematik. Jurusan geografi UNNES :Semarang
- Kinerja, L., & Pemerintah, I. (2021). *Kecamatan sambaliung*. 33.
- Ii, B. A. B., & Daerah, K. G. (2000). *Bab ii gambaran umum kondisi daerah 2.1*. 1–12.
- Munir. (2012). Multimedia Konsep & Aplikasi dalam pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Murad, Rusmadi. 1992. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung : Alumni.
- Nasution. 2016. Metode Research Penelitian Ilmiah. Bumi Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, A. P. 1990. Konversi Hak-hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arloka.
- Parlindungan, A. P. 1998. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Setiady, J. (2013). Aplikasi GPS RTK untuk Pemetaan Bidang Tanah. Online Institut Teknologi Nasional.
- Sheng L.L. (2003). Application of GPS RTK and Total Station Sistem on Dynamic Monitoring Land Use. Taiwan Republic of China.
- Soetami, Siti. 2008. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- UNOOSA. 2011. 10 years of Achievement of the United Nations on Global Navigation Satellite Systems. Jurnal UNOOSA, New York.
- Parlindungan, A. P. 1998. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Perangin, Effendi. 1994. Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum Cetakan 4. Jakarta: Raja Grafindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor : 3760/3.2-100/X/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 Nomor: 01/juknis-300/i/2018 tanggal: 8 Januari 2018.

- Prahasta, E. 2002. Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar. Bandung : informatika.
- Putu Diva Sukmawati. (2019). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(April), 89–102.
- Rahmawati, N. E. (2018). *Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagai Upaya Pemerintah dalam Memberikan ....* <https://lib.unnes.ac.id/38354/>

